

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Polemik Reklamasi Tolak Benoa Bali belum juga selesai. Sampai sejauh ini, resistensi masih dilakukan oleh kelompok yang kontra.¹ Resistensi yang dinamakan Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa ini diperkirakan melakukan perlawanan kurang lebih selama 5 tahun.² Ini berarti polemik Reklamasi Benoa Bali benar-benar belum menemukan titik temu penyelesaian.

Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa bermula di komunitas ForBALI. ForBALI merupakan gabungan masyarakat lintas sektor baik lembaga maupun mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap alam pulau Bali. Kelahiran mereka sesungguhnya berawal pada saat Gubernur Bali menerbitkan izin reklamasi dari PT. Tirta Wahana Bali Internasional yang selanjutnya disingkat PT.TWBI melalui Surat Keterangan nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Rencana Pemcafaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa diterbitkan untuk perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung seluas 838 hektar.

Surat Keterangan nomor 2138/02-C/HK/2012 kemudian dicabut dengan digantikan Surat Keterangan (SK) Gubernur Bali nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali pada 16 Agustus 2013. Terbitnya Surat Keterangan (SK) Gubernur Bali nomor 1727/01-B/HK/2013 justru pada gilirannya tetap menimbulkan kritik, sebab Surat Keterangan (SK) tersebut dianggap sekadar revisi dari Surat Keterangan nomor 2138/02-C/HK/2012. Selanjutnya Surat Keterangan (SK) nomor 1727/01-B/HK/2013 disinyalir memberikan hak kepada PT. TWBI untuk melakukan aktivitas reklamasi Teluk Benoa dengan awalan studi kelayakan Teluk Benoa Bali.

¹ Rindra Devita, "Ribuan Warga Demo Tolak Reklamasi Benoa", Bali Post, diakses dari <https://bit.ly/2xsdrmu> diakses pada 1 Maret 2018.

² Pascale Hunt, "Bali Fight Back", The Diplomat, diakses dari <https://bit.ly/2kxSGMK> diakses pada 1 Maret 2018.

Penerbitan izin tersebut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita. Dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 menegaskan bahwa Teluk Benoa merupakan bagian dari kawasan konservasi. Selain itu diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya melarang reklamasi dilakukan. Terutama di kawasan konservasi. Masyarakat juga menganggap bahwa penerbitan izin dilakukan secara diam-diam dan manipulatif.

Presiden Susilo Bambang Yudhono di sisa-sisa akhir jabatannya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita. Peraturan Presiden tersebut poinnya adalah mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum atau zona penopang. Penerbitan Peraturan Presiden tersebut telah menghapus pasal-pasal yang menegaskan bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi dan mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa “Sebagian” pada kawasan konservasi Pulau Pudut dan Pulau Serangan. Inilah kemudian menyebabkan kawasan konservasi di wilayah Sarbagita luasnya menjadi berkurang. Peraturan Presiden tersebut kemudian dianggap mengakomodir reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha.

Selain mendapatkan restu dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014, PT. TWBI juga mendapatkan izin lokasi reklamasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar. Pemerintah menganggap bahwa potensi sedimentasi dan pengendapan Teluk benoa dapat diantisipasi dengan reklamasi Teluk Benoa. Anggapan tersebut oleh masyarakat dianggap pembenaran atas proses reklamasi Teluk Benoa yang menciptakan pulau-pulau baru seluas 700 hektar. Selain itu, reklamasi berencana mendatangkan 40 juta

meter kubik material dari luar Teluk Benoa yang dianggap akan menyebabkan pendangkalan permanen Teluk Benoa.

Pada saat sebelumnya, masyarakat sudah memprediksi Peraturan Presiden Tahun 2011 tentang RT/RW Kawasan Perkotaan Sarbagita. Prediksi itu sudah dicurigai ketika Presiden SBY menginstruksikan Yusril Izra Mahendra secara khusus untuk menjadi praktisi. Berangkat dari sanalah masyarakat menganggap bahwa pemerintah mulai ambisius untuk berupaya merevisi Perpresnya tersebut. Masyarakat juga mencurigai bahwa manuver tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pemerintah pusat. Manuver tersebut dilakukan dengan aktif berkonsolidasi dengan para akademisi universitas hingga konsultasi publiknya yang dianggap juga secara dia-m-diam. Selain itu, konsolidasi tersebut juga dicurigai hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang pro reklamasi Teluk Benoa, sedangkan pihak masyarakat yang menolak reklamasi tidak dilibatkan.

ForBALI dalam catatan terakhirnya menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dengan Badan Koordinasi (BKPRN) mengadakan konsultasi publik tentang perubahan pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 pada hari Senin 14 April 2014 pukul 14.30 Wita di Ruang Rapat Cempaka Kantor Bappeda Provinsi Bali. Konsultasi publik tersebut yang mengumumkan bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan perairan diubah menjadi kawasan zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Dalam konsultasi publik tersebut dikabarkan bahwa pihak didalamnya tidak ada yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Sekadar catatan, Teluk Benoa secara administratif terletak di perairan lintas Kabupaten/Kota yaitu Kota Kuta, Kuta Selatan, dan Denpasar Selaan. Perairan tersebut telah dikelilingi oleh 12 desa/kelurahan. Tiap 6 desa/kelurahan berada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Secara geologis, Teluk Benoa merupakan perairan pasang surut air yang mana terletak di belahan selatan Pulau

Bali. Maka, pada gilirannya menyebabkan kondisi desa-desa di sekitaran Pulau Bali bagian selatan terancam.³

Terancamnya kondisi desa-desa di sekitaran Bali tersebut menyebabkan perlawanan yang cukup signifikan dari masyarakat Bali yang tergabung dalam komunitas For Bali. Keberadaan ForBALI sejak tahun 2013 telah menunjukkan sikap pro-aktifnya dengan menjalankan berbagai tindakan resistensi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk entitas-entitas transnasional. Adanya persamaan tentang upaya pelestarian lingkungan hidup (*global environment*) dan melindungi kultur, kedaulatan (*sovereignty*) dari masyarakat Bali menjadi titik temu atas munculnya berbagai dukungan terhadap ForBALI tersebut.

Resistensi melalui *Information Politics*. Melalui *Information Politics* ini dapat digunakan anggota dari sebuah jaringan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas secara cepat tentang isu yang sedang diangkat sehingga dapat membuat masyarakat terpengaruh dengan isu tersebut dan dapat memperkuat dari gerakan itu sendiri. Dalam kasus ini, gerakan ForBALI sangat rajin dalam memperluas jaringannya baik didalam negeri maupun diluar negeri, salah satunya gerakan ForBALI selalu menyuarakan dan menginformasikan tentang penolakan reklamasi Teluk Benoa tersebut, dan juga menampilkan kegiatan mereka dalam upaya menolak proyek reklamasi tersebut.⁴

Untuk memperluas jaringannya, gerakan ini memberikan informasi kepada masyarakat luas yang berada jauh dari jangkauan mereka tentang apa itu proyek reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa, alasan mereka menolak proyek reklamasi tersebut, tentang perbedaan antara realita, kajian yang dibuat oleh pihak investor, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sangat berbeda, dan juga informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang isi maupun arah dari

³ Narasi singkat tentang lahirnya ForBALI terhadap proses munculnya fenomena reklamasi Teluk Benoa merupakan saduran dari media resmi ForBALI yang merupakan media informasi valid. Upaya menyadur yang dilakukan oleh peneliti sudah mendapatkan izin dari pihak ForBALI karena untuk kepentingan akademik.

⁴ Margareth E. Keck and Kattryn Sikink, *Transnational and Advocacy Network*, Routledge Publishing, New York, 1999, hlm. 47.

kebijakan pemerintah Indonesia yang mereka anggap bertentangan dengan banyak faktor. Strategi Information politics ini juga digunakan oleh gerakan ForBALI beserta aliansinya untuk menambah anggota, suara dan untuk memperkuat jaringan mereka.

Sosial media bagi sebuah gerakan sosial, merupakan alat yang cukup berguna bagi mereka saat ini. Anggota dari gerakan tersebut dapat mencurahkan opininya melalui sosial media mereka, begitu juga dari gerakan itu sendiri akan menyampaikan opini mereka tentang isu yang mereka angkat, dan melalui kekuatan sosial media mereka menyampaikan tujuan dari pergerakan mereka terhadap isu yang sedang mereka angkat. Selain berguna untuk menyampaikan tujuan mereka, sosial media juga dapat membentuk opini publik dan merubahnya sebagai kekuatan bagi mereka. Berbagai informasi yang sudah mereka sebarakan melalui sosial media mereka secara tidak langsung dapat mempengaruhi orang sekitarnya, dan juga orang luas yang memiliki tujuan yang sama seperti mereka, sehingga mereka yang terpengaruh dengan pemikiran tersebut bersatu dan menciptakan kekuatan baru ataupun menambah kekuatan bagi sebuah gerakan ataupun kelompok yang memiliki tujuan yang sama.⁵

Kedua, pemanfaatan Media Internet. Dalam kasus ini gerakan ForBALI sangat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan strategi ini. ForBALI sangat gencar meng-upload kegiatan mereka dalam website mereka yaitu www.ForBALI.org, yang dimana terdapat banyak artikel yang menjelaskan perkembangan pergerakan mereka, perkembangan tentang proyek reklamasi tersebut, dan segala yang berhubungan dengan proyek reklamasi tersebut. Gerakan ini juga selalu menyuarakan suara mereka lewat sosial media mereka seperti; Twitter, Facebook, Instagram milik mereka dan juga terus memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang janggalnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertentangan dengan realita yang ada. Seperti salah satu contoh dimana pada tahun 2013 mantan presiden Indonesia yang sengaja mengundang

⁵ Ibid.

salah satu pemain sepak bola terkenal yaitu Cristiano Ronaldo yang ditunjuk sebagai duta penanaman bakau pada 26 Juni di Teluk Benoa dalam event “Peduli Mangrove”.⁶

Gerakan ForBALI dapat dikatakan salah satu gerakan yang cukup menarik, karena gerakan ForBALI ini berawal dari sosial media saja namun dapat menjadi gerakan nyata dan dapat bertahan hingga sekarang ini. Selain mereka selalu menyuarakan melalui sosial media, ForBALI juga melakukan long-march secara damai dari Lapangan Parkir Timur Renon menuju depan Kantor Gubernur Bali pada Selasa 17 Juni 2017. Massa juga sempat berhenti dan berorasi di depan Bank Artha Graha Renon milik Tommy Winata. Aksi ini awalnya dimobilisasi melalui sosial media mereka dan dapat berhasil mengumpulkan ribuan massa.⁷ Aksi nyata tersebut berlangsung secara konsisten pada setiap bulannya. Tidak sedikit juga website luar negeri yang juga ikut memposting tentang keadaan yang terjadi di Bali saat ini yang berhubungan dengan permasalahan proyek reklamasi tersebut.

Ketiga, penyebaran informasi melalui media cetak. Pemuda Gianyar mendirikan Baliho untuk memaknai kemenangan dharma melawan adharma sebagaimana makna Galungan. Pemasangan Baliho mereka lakukan pada dini hari 31 Oktober 2017.⁸ Seperti yang disampaikan I Wayan Agus Muliana sebagai Koordinator Pemuda BTR Desa Lebih, pendirian Baliho kali ini selain untuk menunjukkan konsistensi Desa Pekraman Lebih juga sebagai simbolis bahwa kemenangan Dharma atas Adharma dalam menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan harus diperjuangkan.⁹

Pendirian Baliho menjadi aktivitas ForBALI sebagai bagian dari promosi media cetak yang dapat langsung dibaca oleh khalayak. Sejak tahun 2014

⁶ “ForBali: E Paper KMB”, dalam https://issuu.com/epaper-kmb/docs/edisi_25_nopember_2016,

⁷ I Gusti Agung Ayu Kade Galuh, “Media Sosial sebagai Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi” Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13 Nomor 1, 2016

⁸ ForBali, “Memaknai Kemenangan Dharma Dengan Mendirikan Baliho Tolak Reklamasi”, ForBali, diakses dari <https://bit.ly/2GC3SmU> pada tanggal 2 Maret 2018

⁹ *Ibid.*

beberapa Baliho yang secara berhasil dipasang oleh jaringan ForBALI adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Pemasangan Baliho di 9 titik di wilayah Kota Denpasar.
- b. Pemasangan Baliho di 6 titik di wilayah Kabupaten Buleleng.
- c. Pemasangan Baliho di 4 titik di wilayah Kabupaten Jembrana.
- d. Pemasangan Baliho di 7 titik di wilayah Kabupaten Karangasem.
- e. Pemasangan Baliho di 6 titik di wilayah Kabupaten Bangli.

Kemudian penyebarluasan informasi kegiatan ForBALI juga dijalankan pada pemberitaan media cetak. Meskipun tidak ada kerjasama secara khusus, berupa nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara ForBALI dengan surat kabar, namun beberapa pemberitaan dan diterbitkannya opini-opini dari aktivis hingga masyarakat secara luas telah berhasil meningkatkan kapasitas agenda penolakan reklamasi Teluk Benoa. Beberapa surat kabar yang menyuarakan penolakan reklamasi Telok Benoa, diantaranya:¹¹

- a. Surat Kabar Kompas yaitu surat kabar nasional yang memberitakan penolakan reklamasi Telok Benoa sebanyak 24 kali dari periode 2013 hingga 2016.
- b. Surat Kabar Tempo yaitu surat kabar nasional yang memberitakan penolakan reklamasi Telok Benoa sebanyak 16 kali dari periode 2013 hingga 2016.
- c. Surat Kabar Republika yaitu surat kabar nasional yang memberitakan penolakan reklamasi Telok Benoa sebanyak 7 kali dari periode 2013 hingga 2016.
- d. Surat Kabar Tribun Bali yaitu surat kabar regional Bali yang memberitakan penolakan reklamasi Telok Benoa sebanyak 12 kali dari periode 2013 hingga 2016.

¹⁰ Laporan, “Kegiatan ForBali Periode 2014-2017”, Buletin ForBali, Cetakan keXII, Denpasar, 2017, chapter vi

¹¹ *Ibid*

- e. Surat Kabar Radar Bali yaitu surat kabar regional Bali yang memberitakan penolakan reklamasi Teluk Benoa sebanyak 9 kali dari periode 2013 hingga 2016.

Keempat, resistensi melalui *Symbolic Politic*. Strategi *Symbolic Politics* ini pada anggota dari jaringan juga memberikan informasi tentang isu yang sedang diangkat oleh mereka kepada masyarakat luas melalui simbol-simbol, tanda-tanda, maupun momen-momen tertentu. Dalam melakukan strategi ini biasanya sebuah gerakan, maupun NGO melakukannya ditanggal-tanggal tertentu yang berhubungan dengan isu yang sedang mereka angkat, selain memperingati ditanggal tertentu mereka juga mereka membuat kegiatan tertentu yang menggambarkan tentang isu yang mereka angkat, ditambah lagi banyak dari mereka yang membuat tulisan maupun artikel tentang isu yang mereka angkat. Tujuan dari mereka melakukan strategi ini selain untuk memberitahu tentang isu yang mereka angkat, mereka juga bertujuan untuk menarik perhatian pihak-pihak tertentu yang posisinya berada jauh dari ruang lingkungannya. Meskipun terlihat hampir sama dengan strategi *Information Politics* secara sekilas, strategi ini bisa dikatakan jauh lebih dalam daripada strategi *Information Politics*.

Gerakan ForBALI dalam menjalankan strategi ini sudah melakukan banyak cara. Gerakan ForBALI bersama jaringannya yang terdiri dari pemuda desa, kepala adat, pemuka agama, organisasi mahasiswa, NGO, seniman, musisi, dan lain lain membuat dan mengikuti beberapa aksi baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan memanfaatkan jaringannya. Gerakan ini gencar membuat Baliho, maupun poster tentang penolakan mereka terhadap proyek reklamasi tersebut. Tidak sedikit juga banyak Baliho yang mereka buat dihancurkan oleh aparat maupun oknum tertentu. Para pemuda desa yang tergabung dalam STT (Sekaa Teruna Teruni) juga sering bergabung dalam acara-acara di desa mereka seperti memperingati hari jadi desa mereka dengan menampilkan pertunjukan seni dan juga membagikan atribut-atribut tentang penolakan terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa.

Beberapa aksi keterlibatan kelompok masyarakat dalam mendukung program penokakan reklamasi Teluk Benoa diantaranya diwujudkan dalam beberapa aksi unjuk rasa, diantaranya:

- a. Penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa terus meluas. Setelah sebelumnya melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Bali pada 26 Februari 2017, Desa Adat Jimbaran menggelar aksi damai uluwatu dan jimbaran. Selain menggelar orasi, juga digelar deklarasi desa adat Jimbaran menolak reklamasi Teluk Benoa. Pemasangan Baliho dan orasi pengukuhan sikap. Pada aksi ini diisi pembentangan *Giant Flag* seluas 25 x 25 meter dari atas tebing sebagai wujud sikap desa adat Jimbaran menolak reklamasi Teluk Benoa. Bendesa adat Jimbaran dalam orasinya menegaskan bahwa Desa Adat Jimbaran menolak rencana Reklamasi Teluk Benoa. Budiarta juga mengatakan, akan mencabut semua dukungan dalam bentuk apapun yang sudah di sepakati oleh Bendesa yang sebelumnya.¹²
- b. Aksi penolakan itu dilakukan bertepatan dengan pertemuan internasional *World Ocean Summit* (WOS) pada 23 Februari 2017 di Bali. Massa meminta agar pertemuan yang melibatkan sejumlah negara tersebut tidak ditunggangi kepentingan investasi-investasi destruktif yang justru akan merusak laut. Aksi tersebut melibatkan Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa serta ForBALI yang selama ini konsisten memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Wayan Swarsa Selaku Koordinator Pasubayan Desa Adat yang hadir pada aksi tersebut mengatakan perwakilan adat Bali ingin menunjukkan bahwa ada komitmen kuat untuk menjaga laut dari upaya perusakan melalui investasi-investasi, seperti rencana reklamasi Teluk Benoa. “Masyarakat adat yang melawan proyek

¹² ___, “Desa Adat Jimbaran Tegaskan Tolak Reklamasi”, Bali Post, diakses dari <https://bit.ly/2ZmVEqm> pada 2 Maret 2018

reklamasi Teluk Benoa ini tidak memiliki kepentingan apapun selain mempertahankan Teluk Benoa dari ancaman reklamasi yang akan memiliki kepentingan apapun selain mempertahankan Teluk Benoa dari ancaman reklamasi yang akan merusak lingkungan.¹³ Dalam aksi ini, ForBali melakukan resistensi untuk menyuarkan tuntutan mereka dalam menggagalkan proyek reklamasi dan mendapatkan dukungan dari pihak luar yang memiliki power lebih besar.

Disetiap hari jadi Indonesia jaringan dari ForBALI juga melakukan aksinya, salah satu contohnya masyarakat Sanur melakukan Pawai Obor yang diikuti masyarakat yang ada di Sanur. Pada aksi pawai tersebut semarak dengan kibaran atribut tentang penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dibawa pemuda dari Desa Adat Intaran yang tergabung dalam Paguyuban STT Desa Adat Intaran. Selain itu jaringan gerkan ForBALI juga menggelar kegiatan yang bertemakan “Sanga Bhuana Art Event Bali Tolak Reklamasi 2015” pada Minggu, 15 Desember 2015 di Pantai Padangalak, Kesiman, Denpasar Timur. Pada kegiatan tersebut terdiri dari lembaga, komunitas, seniman, mahasiswa, pelajar dan individu yang tergabung dalam jaringan gerakan ForBALI. Aksi tersebut dimeriahkan oleh musisi lokal, seni tradisional bondres, tari tradisional dari berbagai STT di Bali, serta teater. Uniknya lagi dalam kegiatan ini dibuatnya patung kepalan tangan kiri setinggi 13 meter yang menggambarkan simbol perlawanan rakyat Bali terhadap rencana reklamasi tersebut.¹⁴ Superman is Dead adalah band tanah air yang cukup terkenal di Indonesia dan juga salah satu anggota dari jaringan tersebut yang juga gencar menyuarkan dan memberitahu kepada penonton dan fan-base mereka melalui konser yang mereka ikuti maupun yang mereka selenggarakan. Sebagai salah satu anggota jaringan mereka benar-benar serius menyebarkan isu

¹³ ___, “WOC Diminta Tidak Ditanggung Kepentingan Investor”, Bali Post, diakses dari <https://bit.ly/2YduoOd> pada 2 Maret 2018

¹⁴ ___, “Sanga Bhuana Art Event Bali Tolak Reklamasi 2015”, Nusa Bali, diakses dari <https://bit.ly/32ZoVcH> pada 2 Maret 2018

lingkungan ini agar masyarakat luas mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di Teluk Benoa.

Kemudian *Symbolic politics* selanjutnya juga disuarakan ForBALI dengan menggandeng musisi Iwan Fals. Iwan Fals mendukung gerakan ForBALI. Iwan mengkhawatirkan nasib hutan mangrove dan nasib para nelayan.¹⁵ Tidak hanya didalam negeri saja, ForBALI melakukan strategi *Symbolic politics*, mereka juga melakukannya diluar negeri. Seperti yang dilakukan oleh 3 aktivis ForBALI pada tanggal 10 Desember 2015 lalu, yakni Dadang SH Pranoto yang juga gitaris band Navicula dan juga sebagai vokalis Dialog Dini Hari (DDH), ditemani oleh Fadlik Al-Iman, dan Anton Muhajir dari pewarta warga. Selain tiga anggota ForBALI tersebut, turut hadir juga beberapa simpatisan ForBALI termasuk Daniel Price yaitu seorang peneliti yang bersepeda dari Kutub Selatan ke Paris untuk mengampanyekan perubahan iklim. Dalam aksinya, anggota ForBALI membentangkan beberapa poster dengan tulisan Bali Not for Sale, Bali Tolak Reklamasi, Protect Benoa Bay, dan seterusnya. Mereka membentangkan poster-poster tersebut di pintu masuk Green Zone, yaitu kawasan bagi sebagian delegasi masyarakat sipil dalam COP 21 melakukan pertemuan-pertemuan. Aksi tersebut mendapat respon positif dari para pengunjung, ada beberapa dari mereka yang bertanya tentang tuntutan aksi tersebut, dan ada pula yang hanya sekedar untuk memfoto. Selain di pintu masuk Green Zone, aksi tersebut juga dilakukan di depan Blue Zone, yaitu kawasan inti di Le Bourget Paris Timur yang di mana pemimpin dunia lebih dari 140 negara dan 40.000 partisipan hadir dalam COP 21.

Aksi dari ForBALI dalam COP 21 memberi ciri tersendiri bagi mereka, sebelumnya aksi serupa dilakukan oleh aktivis WALHI dan Friends of the Earth (FoE) di Blue Zone. Mereka menyampaikan tuntutan yang sama yaitu tentang perlunya konservasi dan perlindungan kawasan Teluk Benoa dari eksploitasi termasuk rencana pembangunan fasilitas pariwisata baru. Selain membentangkan poster-poster di pintu masuk, anggota ForBALI juga melakukan pawai keliling

¹⁵ Ayat S Karokaro, "Iwan Fals Tolak Reklamasi", Mongabay, diakses dari <https://bit.ly/2ynDVTS> pada 2 Maret 2018

ratusan booth di kawasan tersebut sambil menyanyikan Bali Tolak Reklamasi. Pada hari yang berbeda, di tempat lain, dan masih terkait dengan COP 21, Dadang juga ikut tampil di Point Ephemere pada 8 Desember 2015, di restoran dan kafe di tepi sungai Saint-Martin, yang dimana tempat tersebut adalah tempat para aktivis masyarakat adat berkumpul.¹⁶ Karena kuatnya ForBALI dalam menjalankan strategi Information Politics-nya dalam resistensinya, selain dapat menekan pemerintahan Indonesia, ForBALI juga dapat menambah kekuatannya berupa dukungan dari warga Bali yang berada di Tokyo, Jepang yang anggotanya terus meningkat dari tahun ke tahun dan terus memberi dukungan terhadap gerakan ForBALI untuk menentang Proyek Reklamasi di Teluk Benoa.¹⁷

Tidak hanya warga Bali yang berada di Jepang, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Shizuoka Jepang, melakukan aksi damai di Aoba Koen, depan Balai Kota Shizuoka Jepang pada 10 Mei 2015 yang diikuti sekitar 60 orang. Dalam melakukan aksinya, mereka membentangkan spanduk “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” dan beberapa peserta aksi mengenakan pakaian penari Bali sebagai tanda peduli mereka terhadap pulau Bali yang sedang dilanda isu Reklamasi di Teluk Benoa. Sebelumnya, sekelompok masyarakat Indonesia di Amerika Serikat juga menggelar aksi pada 11 April 2015 tentang penolakan terhadap proyek reklamasi di Teluk Benoa di depan gedung parlemen AS, The Capitol Hill.¹⁸

Selain di The Capitol Hill, kelompok solidaritas yang terdiri dari masyarakat Indonesia yang berdomisili di Negara bagian California bersama orang-orang Amerika lainnya juga melakukan aksi berupa aksi solidaritas Internasional terhadap persoalan yang terjadi di Bali. Bagi mereka proyek tersebut tidak hanya meresahkan orang-orang yang berada di Bali saja, namun juga orang-orang Indonesia yang berada di Amerika. Aksi tersebut dilakukan disaat Presiden

¹⁶ __, “Aktivis ForBALI KemBali Beraksi di COP 21”, ForBali, diakses dari <https://bit.ly/2Zkpyez> pada 2 Maret 2018

¹⁷ Richard Susilo, “Warga Bali di Jepang Rayakan Nyepi dan Protes Reklamasi Teluk Benoa”, Tribun News, diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2016/03/14/warga-bali-di-jepang-rayakan-nyepi-dan-protos-reklamasi-teluk-benoa> pada 2 Maret 2018

¹⁸ __, “Setelah Washington DC, Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bergema di Jepang”, Bali Saja, diakses dari <https://bit.ly/2SOWHg6> pada 2 Maret 2018

Indonesia, Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Diaspora Indonesia di Amerika Serikat di Palace of Fine Art Theater, San Frasisco pada tanggal 16 Februari 2016.¹⁹

Dukungan pun turut diberikan dari Akademisi Muda Bali (Amuba) yang terdiri dari mahasiswa asal Bali yang sedang belajar di Australia pun turut memberikan penolakan terhadap proyek reklamasi di Teluk Benoa. Amuba sendiri bukan hanya terdiri dari mahasiswa saja melainkan terdapat jaringan dosen, pengajar, guru, peneliti, dan cendikiawan yang tersebar di Bali maupun diluar Bali, baik secara geneakolis (kelahiran) maupun secara psikologis (Kejiwaan).²⁰ Dukungan-dukungan berupa aksi maupun demonstrasi yang dilakukan oleh ForBALI dan juga oleh bantuan aliansinya adalah hasil kuatnya strategi resistensi Information Politics yang dilakukan oleh ForBALI.

Kelima, resistensi melalui *Leverage Politics*. Leverage politics merupakan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan dari kinerja aktor resistensi. Melalui langkah ini, aktor resistensi akan memfungsikan jaringan organisasinya untuk mengembangkan isu, menyebarluaskan ide dan gagasan untuk kemudian masuk ke sasaran utama yaitu menggalang kekuatan (collecting entity) untuk dapat memperkuat kekuatan. Sydney G. Tarrow mengemukakan bahwa penggalangan kekuatan dari sebuah organisasi masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi yang berkembang, serta isu yang diusung oleh organisasi tersebut. Nantinya akan dicapai persamaan kepentingan untuk merehabilitasi kebijakan, menghapus hingga menggulingkan sebuah rezim penguasa melalui pembangunan civil power dan civil supremations.²¹

Upaya dalam menyebarluaskan ide dan gagasan dalam penyelamatan Telok Benoa dijalankan ForBALI dengan memfasilitasi aksi demonstrasi di Istana Negara Jakarta pada 22 Januari 2014. Gerakan menolak rencana reklamasi Teluk

¹⁹ I Made Ardhiangga, “Seruan Tolak Reklamasi Benoa Dibentangkan di Amerika Serikat”, Tribun News, diakses dari <https://bit.ly/2STjXtA> pada 2 Maret 2018

²⁰ Nwk, “Akademisi Muda Bali di Australia Tolak Reklamasi Teluk Benoa”, Detik News, diakses dari <https://bit.ly/2YfSkkj> pada 2 Maret 2018

²¹ David S Meyer and Sidney G. Tarrow, *The Social Movement : Contentinous Politics in New Century*, Rowman and Little Field, New York, 1998, hlm. 10.

Benoa, berlanjut ke Jakarta. Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), menggelar aksi demo di depan Istana Presiden, Jakarta. Massa yang terdiri dari para aktivis lingkungan ini mendesak pemerintah pusat menghentikan segala upaya memuluskan proyek reklamasi Teluk Benoa, termasuk Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan mensiasati melalui tata ruang wilayah. Dalam situasi darurat, dimana bencana ekologis telah meluas, kepemimpinan Presiden SBY didesak mengoreksi model pembangunan yang eksploitatif dan mengabaikan daya dukung lingkungan yang terbatas. Tolak reklamasi, untuk menyelamatkan kawasan pesisir di Indonesia.²²

Ketua WALHI Bali ini menegaskan, ancaman kerusakan wilayah pesisir akibat reklamasi bukan hanya menghancurkan kawasan sekitarnya, namun mengancam warga negara lain yang terdampak bencana ekologis. Dia mencontohkan, banjir di utara Jakarta dan banjir bandang di Manado, salah satunya disebabkan oleh proyek reklamasi. Karena itu, pihaknya tak ingin bencana serupa melanda Bali akibat reklamasi. Selama aksi di depan Istana, massa membentangkan sejumlah bendera ForBALI, termasuk tulisan menolak reklamasi. Mereka juga membuat petisi berisi kajian dan penolakan reklamasi.²³

ForBALI juga berhasil membangun afiliasi dan kolaborasi dengan Greenpeace. Pada fase inilah persoalan reklamasi Teluk Benoa menjadi isu internasional yang semakin kuat. Greenpeace Indonesia mengkritik Presiden Jokowi bahwa di awal tahun pemerintahannya dianggap salah arah dalam persoalan wilayah pesisir. Greenpeace menganggep Presiden tidak menghormati aturan hukum yang berlaku. Persoalan Teluk Benoa bagi Greenpeace merupakan bentuk kegagalan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Sebab sangat merugikan keberlangsungan warga dan nelayan disekitar area terdampak

²² ____, "Tolak Reklamasi ForBali Demo di Istana", Bali Post, diakses dari <https://bit.ly/3140f0Q> pada 2 Maret 2018

²³ *Ibid.*

reklamasi. Greenpeace menilai dua kasus tersebut menunjukkan pemerintah berpihak kepada pihak swasta daripada warganya.²⁴

Selain mendapatk Greenpeace Indonesia menekan pemerintah Indonesia, ForBALI juga menekan pemerintah Indonesia melalui COP 21 di Paris. ForBALI yang didukung oleh WALHI dan Friends of the Earth melakukan aksi di Green Zone dan Blue Zone yang bertujuan menyampaikan tuntutan tentang perlunya konservasi dan perlindungan kawasan Teluk Benoa dari eksploitasi termasuk rencana pembangunan fasilitas pariwisata baru. Aksi yang dilakukan oleh ForBALI ini merupakan bentuk dari Leverage Politics, yang dimana ForBALI mengharapkan dukungan dari dunia Internasional melalui aksi tersebut. Sehingga tekanan bagi pemerintah Indonesia akan lebih besar.

Dukungan yang diberikan dunia internasional terhadap ForBali merupakan bentuk dari proses resistensi moral leverage, dimana Indonesia menjadi sorotan dunia internasional karena proses resistensi yang dilakukan ForBali dalam mengangkat isu kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh proyek reklamasi Teluk Benoa menjadi isu internasional atau mendapat banyak sorotan dari masyarakat internasional.

Keenam, resistensi melalui *Accountanbility Politics*. Accountability politics merupakan upaya aktor resistensi ini menekankan dalam pengawasan kinerja pemerintah. Dalam kondisi sebuah negara dengan sistem demokratis maka ini akan berdampak pada terbentuknya sistem pengawasan untuk membangun akuntabilitas dan transparansi yang menjadi prasyarat bagi good government dan clean governance. Untuk dapat menjadi pengawas, maka sebuah aktor gerakan harus memiliki struktur, fungsi dan visi-misi yang jelas agar dapat memberikan pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

Jika dikaitkan dengan gerakan sosial dan resist dalam aspek Accountability politics yang dijalankan oleh ForBALI, maka upaya ini sebenarnya telah masuk dalam tujuan pembentukan (*institutional setting*) dari organisasi ini.

²⁴ Siaran Pers, “Menyingkapi Persoalan Terkini Teluk Benoa dan Teluk Jakarta: Presiden Perlu Membatalkan”, Green Peace, diakses dari <https://bit.ly/2KfwiEg> pada 2 Maret 2018

Dari tahun 2013 hingga pertengahan 2017 setidaknya ForBALI telah menjalankan berbagai agenda dan tindakan nyata. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Implementasi Resistensi dan Gerakan Dalam Konteks
Accountability Politics ForBALI Periode 2013-2017**

No	Periode	Keterangan
	1 Januari 2013	ForBALI mulai fokus terhadap isu reklamasi Teluk Benoa yang rencananya akan digunakan sebagai sirkuit F1.
	3 Juli 2013	ForBALI mulai fokus terhadap isu reklamasi Teluk Benoa yang ternyata mendapat apresiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
	12 Agustus 2013	ForBALI berhasil mengapresiasi kepada DPRD Provinsi Bali untuk meninjau ulang proyek reklamasi Teluk Benoa.
	18 Oktober 2013	ForBALI melaporkan kasus reklamasi ke Ombudsman.
	Desember 2013	ForBALI berhasil mengajak warga Teluk Benoa untuk menolak reklamasi.
	Februari 2014	Greenpeace menyatakan penolakannya pada proyek reklamasi Teluk Benoa.
	Maret 2014 – Januari 2015	Apresiasi dari Beberapa Organisasi Internasional terhadap penolakan reklamasi Teluk Benoa

Sumber : Diolah dari Koran, “Kegiatan ForBALI Periode 2014-2017”, Buletin ForBALI, Cetakan keXII, Denpasar, 2017, chapter vi.

Melalui tabel di atas maka dapat dipahami bahwa langkah dan berbagai upaya ForBALI dalam menolak proyek reklamasi dijalankan secara berkelanjutan dan sistematis, yang pada akhirnya berhasil meraih apresiasi dari salah satu tokoh dunia. Inilah bentuk dari proses pengawasan kebijakan pemerintah oleh ForBali. Pada akhirnya proyek reklamasi Telok Benoa Bali berhasil menjadi isu

internasional. Salah satunya diungkapkan oleh Perdana Mentari Australia Malcolm Turnbull yang menyatakan: “*perlu kajian secara mendalam agar wilayah pesisir Teluk Benoa tidak rusak.*”²⁵ Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa dunia internasional memberikan perhatian atas proyek reklamasi ini yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelestarian lingkungan, seperti yang menjadi kekhawatiran ForBALI.

Penelitian ini berkepentingan ingin melihat bagaimana resistensi komunitas ForBALI terhadap reklamasi oleh PT.TWBI di Teluk Benoa. Peneliti hendak membahas secara mendalam tentang resistensi yang dilakukan ForBALI melalui sudut pandang ilmu sosiologi dengan meminjam teori resistensi James Scott.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini hendak memunculkan gambaran obyektif masalah yaitu bagaimana resistensi dalam komunitas for Bali terhadap Reklamasi Teluk Benoa oleh PT.Tirta Wahana Bali Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian ini untuk mengetahui resistensi komunitas for Bali terhadap Reklamasi Teluk Benoa oleh PT.Tirta Wahana Bali Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wahana pengetahuan dalam disiplin ilmu sosiologi, khususnya mengenai studi gerakan sosial.

²⁵ PM Australia Kunjungi Bali”, Kompas, 8 November 2017

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pelaku gerakan sosial sebagai rujukan pembaharuan bagi gerakan mereka.

1.5 Literature Review

Tinjauan pustaka merupakan sebuah elemen penting untuk mengetahui orisinalitas rancangan penelitian. Dalam tinjauan pustaka terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan gagasan, tetapi berbeda latar penelitian, ide dan pokok kajian dari setiap penelitian. Tinjauan pustaka juga bisa digunakan sebagai rujukan peneliti dan perbandingan dari penelitian yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran tinjauan pustaka yang dilakukan ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

Pertama adalah studi Karunia Putra Pamungkas.²⁶ Penelitian Karunia Putra menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan dua pendekatan teori, pertama, teori Rasionalisasi Petani, asumsinya bahwa setiap individu mengacu pada rasionalisasi yang dimiliki baik secara moral maupun ekonomi, begitupun para petani yang melakukan tindakan defensive terhadap PT. THEEP sebagai tindakan rasionalitas dari masyarakat. Kedua, teori perlawanan petani, teori yang kedua ini mengacu pada konsep James C. Scott yang melihat gaya perlawanan petani sehari-hari, yaitu mereka melakukan perlawanan kecil-kecilan setiap hari, seperti mengambil makanan, menipu, pura-pura tidak tahu, dan lain sebagainya. Resistensi yang dilakukan mencakup persoalan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Penelitian selanjutnya (Ku, 2010) dalam Broadbant & Brockman (2011) mengangkat pertanyaan 1) Mengapa gerakan lingkungan tumbuh begitu cepat di Korea, 2) Bagaimana kondisi struktur dan proses mobilisasi sumberdaya dari

²⁶ Karunia Putra Pamungkas, Resistensi Masyarakat Terhadap Kehadiran PT. THEEP (Studi di Desa Silpang Yul, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung), (Yogyakarta: UIN, 2012)

“politik hijau melalui gerakan sosial” (green politics through social movement).²⁷ Penelitian didalam buku ini mencoba mengulas kasus yang terjadi di Korea, Taiwan, China, Jerman, USA dan Jepang. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa gerakan lingkungan di Korea berkembang disebabkan karena permasalahan lingkungan dan industrialisasi. Itu lebih dari akibat proses sosial dan politik spesifik yang dihubungkan dengan reaksi populer permasalahan lingkungan. Kekuatan gerakan-gerakan lingkungan secara sosial menggambarkan permasalahan lingkungan dan membuat keterbukaan dalam struktur kesempatan politik terbaik.

Selain itu, Abdul Wahid Situmorang menjelaskan tentang perlawanan masyarakat akar rumput dalam menentang tambang didalam hutan lindung.²⁸ Masyarakat setempat yang tidak sepakat terhadap pertambangan tersebut kerja sama dengan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang). Jatam melakukan beberapa tindakan, yaitu mengumpulkan data mengenai hutan lindung di Indonesia dan akan diterbitkan di situs resmi Jatam dan majalah. Data yang didapat akan dikoordinasikan kepada semua jaringan seperti Walhi dan Aman, kemudian mereka bersama organisasi lain melakukan lobi kepada lembaga pemerintahan. Hadirnya lembaga advokasi ini sebagai lembaga yang membantu masyarakat melakukan penolakan selalu berupaya mengakomodir upaya perlawanan masyarakat dengan menghubungkan dengan beberapa kekuatan lain.

Selanjutnya, Eko Siswono²⁹ menekankan pada bagaimana relasi kuasa terjalin diantara tiga komponen dalam melakukan strategi untuk menguatkan kontrol atas lahan trotoar. Penelitian Eko menggunakan Gidden untuk menjelaskan praktek sosial diantara mereka, oleh sebab itulah menandai

²⁷ Jeffrey Broadbent and Vicky Brockman, *East Asian Social Movements*, (New York: Springer, 2011).

²⁸ Abdul Wahid Situmorang, *Gerakan Sosial Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

²⁹ Eko Siswono, *Resistensi dan akomodasi: Suatu kajian tentang hubungan-hubungan kekuasaan pada Pedagang Kaki Lima (PKL), preman dan aparat di Depok*, (Jakarta: Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2009).

bekerjanya kekuasaan akibat hubungan antara struktur dan agensi. Resistensi terjadi karena Perda yang menurut para pedagang PKL tidak sesuai dengan realitas yang harus mereka hadapi.

Berikutnya, Monika Aya Maulida dalam karya skripsinya pada tahun 2017³⁰ mendeskripsikan resistensi yang dilakukan tidak menuju ke arah terbuka karena adanya upaya pendekatan dari PT Petrokimia kepada keluarga dengan memberikan bantuan-bantuan kepada keluarga penderita ISPA. Sehingga setiap upaya resistensi masyarakat yang menjurus ke arah terbuka selalu dapat digagalkan dengan cara halus oleh pihak Petrokimia. Alhasil resistensi yang dilakukan keluarga penderita ISPA hingga saat ini hanyalah dengan cara melakukan mediasi dan negoisasi dengan PT Petrokimia Gresik.

Penelitian yang sedang dilakukan mencoba menjelaskan bagaimana resistensi ForBali terhadap PT TWBI terhadap reklamasi Teluk Benoa di Desa Tanjung Benoa. Dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori resistensi dari James Scott.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Gerakan Sosial

Gerakan sosial oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sekelompok masyarakat yang memiliki aksi terencana melalui program yang sudah terencana demi tercapainya suatu perubahan. Perubahan tersebut dicapai melalui pola-pola yang dilembagakan di masyarakat.³¹

Gerakan sosial secara umum artinya upaya kolektif untuk mengupgrade sebuah pertentangan demi perubahan dalam masyarakat yang mana usaha tersebut

³⁰ Monika Aya Maulida, *Reaksi Keluarga Penderita ISPA Terhadap Dampak Industri (Studi Tentang Resistensi Keluarga Penderita ISPA Terhadap PT Petrokimia Gresik di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik*, (Surabaya: Unair. 2012)

³¹ Diolah dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gerakan%20sosial>

menekankan permainan peran.³² Gerakan sosial dilaksanakan oleh golongan sosial untuk melawan bentuk penindasan dalam ekonomi, politik, agama. Entah itu dilakukan oleh negara atau kelompok tiran.³³

Gerakan sosial secara alamiah adalah bentuk ketidakpuasan suatu kelompok terhadap sebuah situasi dan kondisi yang ada. Awalnya kelompok ini secara organisasi tak terarah dalam arti tidak memiliki perencanaan yang memadai. Orang-orang didalam kelompok ini hanya sekedar membagikan keluh kesahnya. Kemudian, dari proses awal tersebut munculah tokoh-tokoh yang muncul setelah kegelisahan sosial memuncak. Selanjutnya, kelompok tersebut melakukan pembakuan secara organisasi. Namun, disisi lain tidak dipungkiri gerakan melalui organisasi mereka juga pada gilirannya akan punah.³⁴

Ada beberapa kriteria didalam gerakan sosial, yaitu:³⁵

1. Menciptakan perubahan secara mendasar dalam sebuah tatanan sosial, termasuk institusi dasar seperti relasi ketenagakerjaan dan properti.
2. Menciptakan common sense kesadaran tentang solidaritas sebuah kelompok. Selanjutnya tujuan bersama.
3. Mengintegrasikan ide dan ideologi kedalam organisasi sebagai pedoman gerakan.
4. Membakukan anggota-anggota organisasi secara formal yang awalnya tidak terarah dan terorganisir.
5. Menciptakan aturan yang baku untuk melanjutkan eksistensinya sekalipun harus melakukan perubahan struktur organisasi.

Fenomena gerakan sosial secara realitas di belahan bumi manapun tentu saja akan selalu mengalami perubahan. Fenomena tersebut yang pada gilirannya

³² Budi Suryadi, *Sosiologi Politik : Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*, (Yogyakarta. IRCISOD, 2007).

³³ Syamsu A. Kamaruddin, *Pemberontakan Petani Unra 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Sulawesi Selatan pada Masa Pendudukan Jepang)*, *Hubs-Asia* Vol 16, No 1 2012.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wahyudi, *Formasi dan struktur gerakan sosial petani: studi kasus reklamasi/penjarahan atas tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan*, (Malang : UMM Press, c2005), hlm 23.

dikategorikan sebagai bentuk gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama dipandang sebatas resistensi kelas proletar dalam menuntut keadilan bagi mereka. Sedangkan gerakan sosial baru merupakan upaya memperluas makna gerakan sosial lama yang dianggap sempit. Salah satunya bentuk perlawanan kepada dominasi negara dan upaya demokratisasi.³⁶

Secara nafas, gerakan sosial lama cenderung memiliki nafas yang cukup pendek. Diperkirakan hanya mencapai antara lima tahun hingga delapan tahun. Sebab jika sampai melewati fase lima tahun atau delapan tahun tentu saja akan melemah. Yang selanjutnya juga fase ini disebut sebagai “*cooled down*”. Banyak organisasi protes menjadi gerakan sosial.³⁷ Organisasi inilah yang selalu berupaya menciptakan gerakan kolektif atau jika ada sebuah perbedaan pandangan, maka mereka secara alamiah akan menunggu evolusi struktur makro yang sedang terjadi. Selain itu juga misalnya lembaga sentral mengalami kemandegan fungsi maka gerakan ini pada gilirannya disebut sebagai gerakan pinggiran.

Gerakan sosial hadir melalui sebuah proses. Proses inilah mewujudkan pada tahap-tahap lahirnya sebuah gerakan sosial. Tahap-tahap itu adalah:

1. Tahap ketidaknyamanan. Tahap ini lahir dari bentuk ketidakpuasan yang mengalami peningkatan.
2. Tahap perangsangan. Tahap ini lahir ketika ketidakpuasan sedang menguat yang sebab musababnya sudah teridentifikasi dan beberapa rekomendasi sudah diperdebatkan.
3. Tahap formalisasi. Tahap ini lahir ketika munculnya seorang tokoh yang disusul penyusunan rencana, para pendukung sudah dikumpulkan, dan strategi organisasi sudah diciptakan.

³⁶ Suryadi, *Loc.Cit.* hlm. 119.

³⁷ John Lofland, *Protes: Studi tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*, Terj. Luthfi Ashari, (Yogyakarta: INSISTPress, 2003), hlm. 50.

4. Tahap institusionalisasi. Tahap ini dilakukan ketika sudah memulai menjadikan ideologi sebagai pedoman gerakan.³⁸

Gerakan sosial dapat disederhanakan jika berbasis ideologi, yaitu:³⁹

1. Gerakan revolusioner. Gerakan ini lahir untuk menentang nilai-nilai fundamental yang ada dalam tatanan masyarakat.
2. Gerakan reformasi. Gerakan yang berupaya untuk merevisi gerakan yang sudah ada sebelumnya.
3. Gerakan resistensi. Gerakan yang mencoba merevisi gerakan sebelumnya dan melanjutkan dengan bentuk resistensi.
4. Gerakan ekspresif. Gerakan yang tidak memperdulikan soal institusional.

Beragamnya gerakan sosial dapat disederhanakan dari “Besarnya perubahan sosial yang diinginkan” dan model perubahan yang diinginkan”⁴⁰.

Tabel 1.2

BESARAN	TIPE	
	Perubahan Perorangan	Perubahan Sosial
Sebagian	<i>Alternative Movements</i>	<i>Reformative Movements</i>
Menyeluruh	<i>Redemptive Movements</i>	<i>Transformative Movements</i>

Sumber: Diolah oleh peneliti

Alternative movements merupakan gerakan yang berupaya untuk mengubah sebagian perilaku orang. Kedua, *Redemptive Movements* merupakan gerakan yang berupaya untuk mengubah perilaku seorang secara komprehensif. Ketiga, *Reformative Movements* merupakan gerakan yang berupaya mengubah perilaku

³⁸ Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 227.

³⁹ Suryadi. Loc.Cit., hlm. 120.

⁴⁰ Darmawan Triwibowo, Gerakan Sosial, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. xvii-xx.

masyarakat tetapi dalam kerangka lingkup yang masih terbatas. Keempat *Transformative Movements* merupakan gerakan yang berupaya mengubah perilaku masyarakat secara komprehensif. Gerakan juga memiliki tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan moral ekonomi. Ini adalah pendekatan yang merupakan respon terhadap suatu perubahan yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup sebuah kelompok dan faktor ketokohan dianggap sebagai kunci gerakan yang pada umumnya melalui patronase.
- 2) Pendekatan Ekonomi Politik. Ini adalah pendekatan yang secara dasar dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional dari individual yang memandang perubahan yang sedang terjadi berpotensi mengancam mereka. Melalui pendekatan ini yang menekankan pada individu yang dianggap lebih efektif. Pendekatan ini juga lahir atas dasar pandangan bahwa manusia merupakan individu yang memiliki kesadaran rasionalitas. Maka, pandangan inilah melihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rasionalitas individu dengan kelompok.⁴¹
- 3) Pendekatan Historis. Pendekatan ini lahir atas sebuah respon terhadap ancaman-nacaman terhadap norma, nilai dan kepercayaan yang dimiliki.⁴²

Gerakan perlawanan dinilai tidak akan bisa terlaksanakan bila tidak memiliki tokoh atau pemimpin yang bertugas menjadi penggerak. Penyebab terjadinya sebuah konflik biasanya lahir dari sebuah struggle group yang memiliki tiga kondisi, yaitu komunikasi dari orang-orang yang senasib, seorang pemimpin yang mampu membahasakan ideologi, mengkonsolidasikan kelompok dan meamstikan rencana aksi, ketiga legitimasi kelompok secara luas. Pergerakan memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat dan mengontrol opini publik secara efektif. Melalui upaya tersebut masyarakat akan mendukung pergerakan

⁴¹ Mustain Mashud, *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, (Yogyakarta: Ar Ruzz media, 2007), hlm. 335.

⁴² Mustain, *Ibid.*, hlm. 349.

dan perjuangan mereka.⁴³ Gerakan sosial juga menekankan pentingnya subyek *civil society* seperti Ormas, NGO, Media, dan insitusi pendidikan.⁴⁴

1.6.2 Resistensi

Orang-orang miskin pada umumnya menjadikan situasi dan kondisi mereka menjadikan bahasa resistensi dan konformitas publik⁴⁵. Secara etimologis, melawan artinya mengupayakan sekuat tenaga untuk menahan atau membalas kekuatan. Resistensi lahir dari orang-orang yang kalah. Resistensi merupakan bentuk riil seperti menolak pajak yang dilakukan oleh kelas penguasa. Resistensi terjadi antara dua kelas yang berfokus pada aspek materiil. Resistensi juga merupakan pertentangan sebiah ideologi atau resistensi juga terjadi entah itu individu atau kolektif. Pada titik ini, resistensi hanya dinilai lebih memberatkan pada tujuan daripada sebuah konsekuensi.

Resistensi lahir oleh kelompok entah individu maupun masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan ditengah-tengah kehidupan mereka.⁴⁶ Maka, jika resistensi ini mencapai puncaknya gerakan sosial. Gerakan sosial inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sebelumnya menjadi lebih baik.

Resistensi bagi Scott dibagi menjadi dua kategori yaitu resistensi yang disebabkan secara langsung dan resistensi yang disebabkan tidak langsung. Resistensi ssecara langsung seperti ancaman, paksaan, tekanan yang dilakukan oleh kelas penguasa. Sedangkan resistensi tidak langsung dilakukan secara diam-diam. Biasanya, resistensi secara diam-diam mampu mencapai hasil yang maksimal bila dibandingkan resistensi secara langsung.

⁴³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori sosiologi modern, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 34-35.

⁴⁴ Bill Moyer, Merencanakan Pergerakan, (Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2004), hlm 17

⁴⁵ James C Scott, Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 381.

⁴⁶ Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan, (Yogyakarta: Insist Press dan Insist Fellowship Program, 2002).

Resistensi secara eksplisit bagi Scott dianggap sebagai resistensi yang serius karena dilakukan secara terorganisir, sistematis, kooperatif, tanpa pamrih, memiliki konsekuensi revolusioner. Sedangkan resistensi secara implisit sebaliknya.⁴⁷ Sedangkan perlawanan merupakan sebuah pemikiran dan simbol.

1.7 Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori sebagai penopang fakta. Sebagai pendukung, maka teori diharapkan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu teori yang digunakan dapat memberikan analisa mengenai gambaran fakta tentang komunitas For Bali dalam upaya melawan perusahaan PT.TWBI dibalik reklamasi Teluk Benoa, Pulau Bali.

1.7.1 Teori Resistensi

Reklamasi Teluk Benoa sedikit banyak telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam diri masyarakat Desa Tanjung Benoa. Masyarakat mengkhawatirkan reklamasi tetap dilakukan maka akan mengancam kelestarian laut dan mata pencaharian masyarakat desa Tanjung Benoa. Sehingga berbagai kejadian yang telah terjadi di masyarakat membuat mereka memilih jalan untuk melakukan resistensi terhadap reklamasi Teluk Benoa. Berbagai upaya resistensi telah dilakukan seperti dengan melakukan aksi non litigasi hingga aksi litigasi.

Reklamasi Teluk Benoa yang dekat dengan Desa Benoa menjadi salah satu pemicu terjadinya resistensi masyarakat. Dengan jarak pengerukan dengan pengerukan laut hanya beberapa atus meter saja, yang mana tentu menjadi ancaman tersendiri bagi sumber mata pencaharian Desa Tanjung Benoa. Masyarakat khawatir jika reklamasi tetap dilakukan maka akan mempengaruhi kualitas isi teluk. Karena bagi masyarakat teluk Benoa memiliki banyak hal yang dapat mendukung aspek kehidupan mereka mulai dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.

⁴⁷ Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, (Yogyakarta: Insist Press dan Insist Fellowship Program, 2002).

Oleh karena itu berbagai resistensi yang telah dilakukan masyarakat Tanjung Benoa melalui gerakan For Bali akan coba dijelaskan peneliti dengan menggunakan teori resistensi. Resistensi dalam konsep James Scott bertujuan untuk mendapatkan reaksi dari pihak yang dilawan.⁴⁸ Resistensi dilakukan untuk mendapatkan keadilan atas penindasan oleh kelas penguasa.⁴⁹

Scott mendefinisikan resistensi sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibaut oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Menurut Scott beberapa bentuk resistensi yaitu: resistensi public atau terbuka (*public transcript*) dan resistensi tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*).

Kategori tersebut oleh Scott dibedakan atas artikulasi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Resistensi terbuka dikarakteristikan adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas superdinat. Sementara resistensi tertutup dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas antara kedua bentuk resistensi tersebut, Scott mencirikan resistensi terbuka sebagai resistensi yang bersifat: 1) organik, sistematis, kooperatif, 2) berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, 3) berkonsekuensi atau maksud meniadakan basis dominasi. Dengan demikian aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan (dan lain-lain) merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat.

Di samping itu, resistensi yang dilakukan oleh kelompok atau individu juga mendapat dukungan dari organisasi atau individu yang umumnya berasal dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, NGO, tokoh intelektual setempat. Mereka dibedakan atas dua kategori, yaitu: 1) para pendukung spesialis yakni, individu

⁴⁸ Scott. Loc.Cit., hlm. 321.

⁴⁹ Michael Hardt and Antonio Negri, *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, (London: Penguin Books, 2004).

dan organisasi yang secara spesifik membangun keterampilan dan ideologi untuk menentang kebijakan tersebut, 2) para pendukung umum yakni individu atau organisasi yang menganggap pembelaan tersebut merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi dan keadilan⁵⁰.

1.8 Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini hendak menghasilkan data deksriptif lisan maupun tertulis, tingkah laku yang dapat diamati dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada entah historis atau saat ini⁵¹. Penelitian ini juga menggunakan teks dan gambar dalam analisis data.⁵²

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian mengenai resistensi komunitas For Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelittian deskriptif. Kasus yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah resistensi komunitas For Bali terhadap Reklamasi Teluk Benoa yang meliputi bagaimana ketegangan yang terjadi yang menyebabkan terjadinya resistensi dan menjelaskan bagaimana dinamika gerakan itu dilakukan. Dimana dalam kasus tersebut akan menjelaskkan dinamika gerakan dalam penolakan terhadap Reklamasi Teluk Benoa. Meskipun tidak dapat menjelaskan secara detail namun penelitian ini setidaknya akan mencoba menjelaskan mengenai dinamika gerakan yang berkembang dalam resistensi terhadap proyek Reklamasi Teluk Benoa.

⁵⁰ Arianto, Sangaji, PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000).

⁵¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 166.

⁵² John W. Creswell, Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, (California: SAGE Publication, 2009), hlm. 173.

1.8.2 Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Alasan mengapa peneliti memilih tempat tersebut karena:

1. Di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung merupakan salah satu dusun yang menjadi pelopor adanya resistensi masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa..
2. Desa Tanjung Benoa merupakan satu dari sekian desa di Kecamatan Kuta Selatan yang menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian utamanya.

Oleh karena alasan diatas, maka peneliti memilih Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagai lokasi melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.8.3 Setting Sosial

Masyarakat yang desa adat yang mendapatkan ikan dari laut untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dan terlibat atau sedang melakukan resistensi terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang juga tergabung didalam komunitas For Bali.

1.8.4 Metode Penentuan Informan

Penelitian ini dalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan sebagai berikut:

1. I Wayan Kembar yang merupakan sebagai Tokoh masyarakat Tanjung Benoa. Dari informan ini peneliti akan berupaya menggali data tentang awal mula proses sosialisasi proyek reklamasi yang dilakukan oleh pihak TWBI kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Benoa.
2. Gendo Suadarna yang merupakan koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi. Dari informan ini peneliti berupaya mendapatkan data tentang sejarah gerakan perlawanan terhadap reklamasi Tanjung Benoa.
3. Anak Agung Ayu sebagai masyarakat setempat dari komunitas For Bali. Dari informan ini peneliti berkehendak mendapatkan informasi tentang gerakan sosial. Ini berpijak dari informasi bahwa reklamasi Tanjung

Benoa pada gilirannya juga meniadakan hak-hak ekonomi kelompok nelayan di sana.

4. Nyoman Punia yang merupakan Ketua Forum Kepala Lingkungan Kelurahan Kuta. Dari informan ini peneliti berkehendak mendapatkan data tentang gerakan sosial yang dikoordinasikan antar kelurahan di Kuta, Bali.
5. Ketut Puja yang merupakan koordinator desa di Benoa. Dari informan ini peneliti juga berkehendak mendapatkan data tentang gerakan yang dikoordinasikan di skala antar desa. Tentang informasi dan metode-metode nya.
6. Wayan Parna yang merupakan tokoh anak muda mewakili komunitas nelayan anak muda di Tanjung Benoa. Dari informan ini peneliti berkehendak mendapatkan data tentang gerakan yang dinaungi anak-anak muda nelayan di Benoa. Mengingat anak-anak muda tidak apatis disana dan juga mempunyai kontribusi yang masif terhadap gerakan For Bali.

1.8.5 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam beberapa cara sesuai triangulasi data⁵³ yaitu wawancara mendalam dan Observasi. Wawancara mendalam dilakukan melalui interview guide yang sudah disediakan. Sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan gerakan perlawanan yang tidak dapat diwawancarai.

1.8.6 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

⁵³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI - Press), 1992).

Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan dalam menganalisa data ialah mengolah dan mengorganisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Semuanya diolah atau diorganisasikan secara teratur guna mempermudah pemahaman informasi. Dengan cara mentranskrip hasil wawancara itu lalu dipilah mana jawaban yang dapat menjawab rumusan penelitian yang sudah kita tentukan.